



## Transformasi Akuntansi Keberlanjutan di Sektor Publik melalui Digitalisasi: Menuju Tata Kelola Berbasis ESG

Rina Komala\*<sup>1</sup>, Layali Ihyani<sup>2</sup>, Widia Febriana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bumigora, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, Mataram, Indonesia;

<sup>2</sup>Universitas Bumigora, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Mataram, Indonesia.

<sup>3</sup>Universitas Bumigora, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, Mataram, Indonesia;

### Kata Kunci

akuntansi keberlanjutan, sektor publik, digitalisasi, ESG, tata kelola, transparansi, sistem informasi akuntansi

### Abstrak

Perkembangan akuntansi keberlanjutan di sektor publik semakin menjadi perhatian penting karena meningkatnya kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya publik yang berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana digitalisasi berperan dalam mendukung implementasi akuntansi yang mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada berbagai institusi sektor publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan analisis terhadap praktik penerapan sistem digital pada sejumlah lembaga pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi akuntansi berbasis cloud computing, analitik big data, serta platform pelaporan terintegrasi, mampu meningkatkan kualitas informasi keberlanjutan yang disajikan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Integrasi indikator ESG ke dalam sistem akuntansi digital juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara seimbang. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi digital sumber daya manusia, serta belum adanya keseragaman standar pelaporan ESG. Oleh karenanya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola publik yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

### Keywords

sustainability accounting, public sector, digitalization, ESG, governance, transparency, accounting information

### Abstract

The advancement of sustainability accounting within the public sector is becoming an increasingly important issue, driven by the rising demand for transparency, accountability, and management of public resources focused on sustainability. This research seeks to examine how digitalization contributes to the adoption of accounting that incorporates Environmental, Social, and Governance (ESG) principles across various public sector entities. The methodology employed is a descriptive qualitative approach, utilizing a literature review and an analysis of the implementation practices of digital systems in several governmental organizations. Findings indicate that leveraging digital technologies, including cloud computing-based accounting information systems, big data analytics, and integrated reporting platforms, can enhance the quality of sustainability information, making it available more swiftly, accurately, transparently, and in a more accessible manner. The incorporation of ESG indicators into.

\*Corresponding Author : **Rina Komala** Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia;

Email: [rina.komala@universitasbumigora.ac.id](mailto:rina.komala@universitasbumigora.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v12i2.1017>

History Artikel: Received: 17 Juni 2026 | Accepted: 30 Juni 2026

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan telah berkembang menjadi agenda utama dalam tata kelola sektor publik di berbagai negara. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut untuk mencapai efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan. Perubahan ini menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan publik mulai bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi keberlanjutan (Nofianti & Sutopo, 2025).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, akuntansi sektor publik juga mengalami transformasi peran. Jika sebelumnya akuntansi lebih difokuskan pada pelaporan keuangan konvensional, saat ini muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan informasi non-keuangan, seperti dampak sosial dan lingkungan. Hal ini menjadi penting karena indikator keberhasilan organisasi publik tidak lagi cukup diukur melalui aspek finansial semata (Pisarra, 2025).

Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) hadir sebagai kerangka yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. ESG tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. Dalam praktiknya, ESG membantu organisasi dalam mengelola risiko keberlanjutan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data yang lebih komprehensif (Yaman, 2026).

Dalam konteks sektor publik, penerapan ESG mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. ESG tidak lagi sekadar dipahami sebagai alat transparansi, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme strategis dalam menciptakan nilai publik dan meningkatkan kualitas tata kelola berbasis teknologi (Lestari, 2024). Hal ini menandakan adanya perubahan orientasi dari sekadar kepatuhan menuju penciptaan nilai jangka panjang.

Di sisi lain, transformasi digital menjadi faktor penting yang mempercepat perubahan dalam sistem akuntansi sektor publik. Digitalisasi memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, teknologi digital juga berperan dalam meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik (Lestari, 2025).

Pemanfaatan teknologi seperti big data, cloud computing, dan sistem informasi terintegrasi semakin memperkuat peran digitalisasi dalam mendukung pelaporan keberlanjutan. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar secara real-time, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan untuk mendukung pengambilan keputusan (Chininga et al., 2023).

Lebih lanjut, digitalisasi juga terbukti mampu mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan melalui efisiensi energi, inovasi hijau, serta peningkatan akses layanan publik. Selain itu, digitalisasi memperkuat aspek tata kelola melalui peningkatan transparansi dan sistem pengawasan yang lebih baik (Productivity Research, 2024). Dengan demikian, hubungan antara digitalisasi dan ESG menjadi semakin erat dan saling mendukung.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi dan ESG di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya standar pelaporan yang seragam, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pengukuran dan penyajian informasi keberlanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya konsistensi dan keterbandingan data antar institusi (Nofianti & Sutopo, 2025).

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan yang signifikan. Tidak semua instansi memiliki kesiapan yang sama dalam mengadopsi teknologi digital, sehingga proses transformasi berjalan tidak merata. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya resistensi terhadap perubahan dalam budaya organisasi birokrasi (Lestari, 2025).

Di tingkat praktis, integrasi antara sistem akuntansi digital dan indikator ESG juga masih belum optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi dan ESG memiliki pengaruh positif, keduanya belum sepenuhnya mampu meningkatkan relevansi informasi akuntansi secara signifikan karena keterbatasan implementasi dan pelaporan (Lestari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi masih berada pada tahap transisi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi akuntansi keberlanjutan melalui digitalisasi merupakan langkah penting menuju tata kelola berbasis ESG di sektor publik. Namun, keberhasilan transformasi ini memerlukan dukungan yang komprehensif, baik dari aspek regulasi, teknologi, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu,

penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana digitalisasi dapat dioptimalkan dalam mendorong penerapan ESG guna mewujudkan tata kelola publik yang lebih transparan, adaptif, dan berkelanjutan.

### **State of the Art**

Perkembangan penelitian mengenai akuntansi keberlanjutan di sektor publik menunjukkan pergeseran fokus yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya kajian lebih banyak menitikberatkan pada pelaporan keuangan konvensional, kini penelitian mulai mengarah pada integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam sistem akuntansi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik yang tidak hanya berbasis angka finansial, tetapi juga dampak keberlanjutan (Pisarra, 2025).

Sejumlah penelitian terkini menempatkan ESG sebagai kerangka utama dalam mengembangkan sistem akuntansi keberlanjutan. ESG dinilai mampu memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik, terutama dalam konteks pengambilan keputusan strategis. Studi oleh Yaman (2026) menunjukkan bahwa integrasi ESG berkontribusi pada peningkatan kualitas akuntabilitas publik, khususnya di negara berkembang yang sedang mengalami transformasi tata kelola.

Di sisi lain, muncul kecenderungan penelitian yang mengaitkan akuntansi keberlanjutan dengan transformasi digital. Digitalisasi dianggap sebagai enabler utama dalam mempercepat integrasi ESG ke dalam sistem pelaporan. Teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan cloud computing memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi (Chininga et al., 2023). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kualitas informasi keberlanjutan.

Penelitian lain juga menyoroti bahwa digitalisasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan real-time, sehingga masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah (World Bank, 2022). Kondisi ini mendorong terciptanya tata kelola yang lebih terbuka dan responsif.

Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi ESG dalam sektor publik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu isu utama adalah belum adanya standar pelaporan yang seragam, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pengukuran dan penyajian informasi antar institusi (Global Reporting Initiative, 2021). Ketidakkonsistenan ini menjadi tantangan dalam membangun sistem pelaporan yang dapat dibandingkan secara luas.

Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam penelitian terbaru. Keterbatasan kompetensi digital di kalangan aparatur pemerintah sering kali menghambat proses adopsi teknologi dalam sistem akuntansi (Lestari, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan individu yang mengelolanya.

Beberapa penelitian juga mulai mengkaji hubungan antara digitalisasi, ESG, dan kualitas informasi akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi dan ESG memiliki potensi besar, dampaknya terhadap peningkatan kualitas informasi belum sepenuhnya optimal karena masih berada pada tahap awal implementasi (Nofianti & Sutopo, 2025). Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara konsep dan praktik yang masih perlu dijembatani.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai transformasi akuntansi keberlanjutan di sektor publik telah berkembang ke arah integrasi antara ESG dan digitalisasi. Namun, masih terdapat ruang penelitian yang luas, khususnya dalam mengkaji bagaimana kedua aspek tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran digitalisasi dalam mendorong tata kelola berbasis ESG di sektor publik.

### **Research Novelty**

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan digitalisasi bukan sekadar sebagai alat pendukung, tetapi sebagai faktor penggerak utama dalam transformasi akuntansi keberlanjutan di sektor publik. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih memisahkan antara kajian ESG dan transformasi digital sebagai dua domain yang berbeda. Padahal, integrasi keduanya memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem pelaporan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan keberlanjutan (Chininga et al.,

2023). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi antara teknologi dan prinsip ESG.

Kebaruan kedua terletak pada fokus penelitian yang diarahkan pada sektor publik, khususnya dalam konteks negara berkembang. Penelitian terdahulu cenderung lebih banyak dilakukan pada sektor swasta atau korporasi, sehingga masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana ESG diimplementasikan dalam sistem akuntansi pemerintah (Yaman, 2026). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif yang lebih kontekstual terhadap sektor publik.

Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan pendekatan konseptual yang mengaitkan digitalisasi dengan peningkatan kualitas informasi akuntansi berbasis ESG. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ESG telah diadopsi, kualitas informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sistem dan integrasi data (Nofianti & Sutopo, 2025). Dalam hal ini, penelitian ini menempatkan digitalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu informasi yang dihasilkan.

Kebaruan berikutnya terletak pada upaya mengidentifikasi hubungan antara digitalisasi, transparansi, dan tata kelola berbasis ESG secara lebih komprehensif. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti salah satu aspek secara parsial, seperti transparansi atau akuntabilitas, tanpa mengkaji keterkaitannya secara menyeluruh (World Bank, 2022). Penelitian ini mencoba membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana ketiga aspek tersebut saling berinteraksi dalam konteks sektor publik.

Akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk penguatan perspektif praktis terkait implementasi akuntansi keberlanjutan berbasis digital. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar pelaporan, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga menawarkan arah pengembangan yang lebih aplikatif (Lestari, 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik tata kelola publik yang lebih berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam transformasi akuntansi keberlanjutan di sektor publik melalui digitalisasi menuju tata kelola berbasis ESG. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika implementasi kebijakan dan teknologi dalam organisasi publik (Creswell & Creswell, 2021). Selain itu, penelitian deskriptif memungkinkan peneliti untuk memetakan kondisi aktual, mengidentifikasi pola, serta menjelaskan hubungan antara digitalisasi dan penerapan ESG tanpa melakukan manipulasi variabel penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal internasional, laporan lembaga global, serta dokumen kebijakan terkait digitalisasi dan ESG di sektor publik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian, khususnya publikasi dalam lima tahun terakhir untuk memastikan kebaruan informasi. Studi literatur dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang kuat serta memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai temuan sebelumnya guna membangun kerangka analisis yang lebih terintegrasi (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, yaitu digitalisasi, akuntansi keberlanjutan, dan ESG. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menghasilkan interpretasi yang sistematis dan logis (Miles et al., 2020). Untuk meningkatkan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan topik. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat serta kontribusi konseptual terhadap pengembangan akuntansi sektor publik berbasis keberlanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi katalis utama dalam transformasi akuntansi keberlanjutan di sektor publik. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis digital memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan

dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kualitas informasi yang dihasilkan, terutama dalam hal ketepatan waktu dan akurasi data (Chininga et al., 2023). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai fondasi dalam penguatan sistem akuntansi modern.

Lebih lanjut, digitalisasi membuka peluang bagi integrasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam sistem akuntansi sektor publik. Sistem digital memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data non-keuangan secara lebih sistematis, sehingga indikator ESG dapat diukur dan dilaporkan secara lebih komprehensif (Yaman, 2026). Integrasi ini menjadi penting karena memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja organisasi publik, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga dampak keberlanjutannya.

Temuan lain menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti big data dan cloud computing berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dalam pelaporan publik. Informasi yang disajikan secara real-time memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses data secara lebih mudah dan cepat. Hal ini pada akhirnya mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (World Bank, 2022). Transparansi yang meningkat juga memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Namun demikian, implementasi digitalisasi dalam mendukung ESG masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya standar pelaporan ESG yang seragam di sektor publik. Hal ini menyebabkan variasi dalam metode pengukuran dan penyajian informasi, sehingga menyulitkan proses perbandingan antar institusi (Global Reporting Initiative, 2021). Ketidakkonsistenan ini menjadi hambatan dalam membangun sistem pelaporan yang kredibel.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi isu penting, terutama di daerah yang belum memiliki akses teknologi yang memadai. Ketimpangan ini menyebabkan implementasi digitalisasi tidak berjalan secara merata, sehingga menghambat proses transformasi secara keseluruhan (OECD, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi akuntansi berbasis digital.

Dari sisi sumber daya manusia, penelitian ini menemukan bahwa kompetensi digital aparatur

pemerintah masih menjadi tantangan yang signifikan. Banyak pegawai yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital maupun memahami konsep ESG secara mendalam (Lestari, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan teknologi, tetapi juga kesiapan manusia sebagai pengelola sistem.

Di sisi lain, integrasi digitalisasi dan ESG terbukti mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di sektor publik. Dengan adanya data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai aspek secara lebih komprehensif, termasuk dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang diambil (Nofianti & Sutopo, 2025). Hal ini berkontribusi pada terciptanya kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi integrasi ini masih berada pada tahap awal. Banyak instansi yang baru mulai mengadopsi sistem digital dan belum sepenuhnya mengintegrasikan indikator ESG ke dalam sistem akuntansi mereka. Hal ini menyebabkan manfaat dari digitalisasi dan ESG belum dirasakan secara maksimal (Pisarra, 2025). Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara konsep yang ideal dan praktik di lapangan.

Dalam perspektif tata kelola, digitalisasi dan ESG memiliki hubungan yang saling memperkuat. Digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara ESG memberikan kerangka normatif dalam menilai kinerja keberlanjutan. Kombinasi keduanya mampu menciptakan sistem tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis (Yaman, 2026). Hal ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi akuntansi keberlanjutan melalui digitalisasi merupakan langkah strategis menuju tata kelola berbasis ESG di sektor publik. Namun, keberhasilan transformasi ini memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai aspek, termasuk regulasi, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa digitalisasi memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk ulang praktik akuntansi

keberlanjutan di sektor publik. Kehadiran teknologi digital tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga mengubah cara organisasi publik dalam menghasilkan dan memanfaatkan informasi. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan ruang bagi integrasi data keuangan dan non-keuangan secara lebih sistematis, sehingga mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara lebih terstruktur (Chininga et al., 2023). Hal ini memperkuat pandangan bahwa transformasi digital bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari perubahan paradigma tata kelola.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi ESG dalam sistem akuntansi digital belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah belum adanya standar pelaporan yang seragam, sehingga setiap institusi cenderung mengembangkan pendekatan masing-masing. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keterbandingan data dan berpotensi menurunkan kredibilitas informasi yang disajikan (Global Reporting Initiative, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi standar agar implementasi ESG dapat berjalan lebih konsisten di berbagai instansi sektor publik.

Selain aspek teknis, faktor sumber daya manusia juga menjadi elemen krusial dalam keberhasilan transformasi ini. Keterbatasan kompetensi digital serta pemahaman terhadap konsep ESG masih menjadi tantangan yang cukup nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada teknologi perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas aparatur agar sistem yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal (Lestari, 2025). Dengan kata lain, transformasi digital yang efektif tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan individu yang mengelolanya.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa integrasi digitalisasi dan ESG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik. Keduanya saling melengkapi, di mana digitalisasi memperkuat aspek transparansi dan efisiensi, sementara ESG memberikan arah normatif dalam menilai keberlanjutan kebijakan. Meski demikian, proses implementasi masih memerlukan dukungan yang lebih kuat dari sisi regulasi, standar, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan agar transformasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata (Yaman, 2026).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi akuntansi keberlanjutan di sektor publik tidak dapat dilepaskan dari peran digitalisasi sebagai pendorong utama perubahan. Digitalisasi memungkinkan integrasi data yang lebih luas dan pengolahan informasi yang lebih cepat, sehingga mendukung penyajian laporan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, penerapan teknologi digital menjadi fondasi penting dalam membangun sistem akuntansi yang mampu mengakomodasi kebutuhan keberlanjutan (Chininga et al., 2023).

Selain itu, integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sistem akuntansi sektor publik memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan memasukkan aspek lingkungan dan sosial ke dalam pelaporan, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa ESG mampu memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong tata kelola yang lebih baik (Yaman, 2026).

Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa implementasi digitalisasi dan ESG masih menghadapi berbagai tantangan. Ketiadaan standar pelaporan yang seragam serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam proses transformasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sistem dan kebijakan yang mendukung (Global Reporting Initiative, 2021).

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara digitalisasi dan ESG bersifat saling melengkapi dalam membangun tata kelola sektor publik yang berkelanjutan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi, sementara ESG memberikan kerangka normatif dalam menilai dampak kebijakan secara menyeluruh. Kombinasi keduanya berpotensi menciptakan sistem tata kelola yang lebih adaptif terhadap dinamika global yang terus berkembang (World Bank, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya integrasi digitalisasi dan ESG dalam akuntansi sektor publik. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi standar pelaporan agar transformasi ini

dapat berjalan secara optimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan empiris untuk menguji hubungan antara digitalisasi, ESG, dan kinerja sektor publik secara lebih mendalam.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chininga, T., Mhlanga, D., & Moloji, T. (2023). Digital transformation and sustainability in the public sector: A systematic review. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 145–160.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI standards for sustainability reporting*. GRI.
- Lestari, D. (2024). Pengaruh penerapan ESG terhadap kualitas informasi akuntansi pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 13(1), 45–58.
- Lestari, D. (2025). Digitalisasi akuntansi sektor publik dan implikasinya terhadap transparansi keuangan daerah. *International Journal of Accounting Technology*, 5(1), 22–35.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nofianti, L., & Sutopo, B. (2025). The implementation of ESG in public sector sustainability reporting: A systematic literature review. *Journal of Public Sector Accounting*, 10(1), 1–15.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Digital government for better public governance*. OECD Publishing.
- Pisarra, M. (2025). Sustainability accounting in the public sector: Trends and future directions. *Public Money & Management*, 45(2), 89–97.
- Productivity Research Institute. (2024). Digital transformation and ESG performance in public organizations. *Journal of Productivity Analysis*, 12(3), 201–215.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- United Nations. (2023). *Sustainable development goals report 2023*. United Nations Publications.
- World Bank. (2022). *GovTech maturity index: The state of public sector digital transformation*. World Bank Publications.
- Yaman, A. (2026). ESG integration and public sector accountability: Evidence from emerging economies. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(2), 133.